



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 027/Kep.269-BKAD/2023

TENTANG

STANDARISASI HARGA TERTINGGI SATUAN BARANG/JASA

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1710-BKAD/2022, namun dalam perkembangannya terdapat usulan dari Perangkat Daerah tentang perubahan komponen pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 02);

Memperhatikan : Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor: B/KU.01.02/234-BKAD/I/2023 Hal Pedoman Penyusunan RKAP-SKPD Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 - KEDUA : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
 - KETIGA : Ketentuan Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai penentuan harga atau nilai tertinggi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
 - KEEMPAT : Nilai atau harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sudah termasuk keuntungan dan biaya *overhead*.
 - KELIMA : Nilai atau harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11% (sebelas persen), terkecuali alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

KEENAM ...

- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1710-BKAD/2022 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku, dengan perubahan penambahan komponen jenis dan harga satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Februari 2023
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 00

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

**STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.12	Persediaan			
1.1.12.01	Barang Pakai Habis			
1.1.12.01.01	Bahan			
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			
1.1.12.01.01.0001	Pahat beton (baja keras)	-	Buah	168,106
1.1.12.01.01.0001	Palu besi/godam (baja keras)	-	Buah	274,835
1.1.12.01.01.0001	Roll meter 5 m	-	Buah	31,835
1.1.12.01.01.0001	Roll meter 50 m	-	Buah	143,945
1.1.12.01.01.0001	Linggis (baja keras)	-	Buah	59,929
1.1.12.01.01.0001	Semak/Perdu	-	M2	11,451
1.1.12.01.01.0001	Aspal drum 155 kg (di pabrik)	-	Drum	2,539,427
1.1.12.01.01.0001	Aspal Curah	-	Kg	12,778
1.1.12.01.01.0001	Aspal Minyak	-	Kg	12,778
1.1.12.01.01.0001	Aspal Emulsi	-	Kg	12,453
1.1.12.01.01.0001	Aspal Karet	-	Kg	15,116
1.1.12.01.01.0001	Semen warna	-	Kg	17,750
1.1.12.01.01.0001	Semen / PC (zak)	-	Zak	62,983
1.1.12.01.01.0001	Semen (PC) (kg)	-	Kg	1,575
1.1.12.01.01.0001	Semen Khusus	-	Kg	27,980
1.1.12.01.01.0001	Chipping	-	M3	188,949
1.1.12.01.01.0001	Kaca polos 2 mm	-	M2	183,223
1.1.12.01.01.0001	Pasir urug (di quarry)	-	M3	124,693
1.1.12.01.01.0001	Pasir batu (sirtu) tersaring (di quarry)	-	M3	137,417
1.1.12.01.01.0001	Sirtu (di lokasi pekerjaan)	-	M3	245,817
1.1.12.01.01.0001	Pasir pasang (Sedang) (di quarry)	-	M3	178,687
1.1.12.01.01.0001	Abu batu (di Quarry)	-	M3	153,776
1.1.12.01.01.0001	Material Agregat Kelas A	-	M3	163,183
1.1.12.01.01.0001	Material Agregat Kelas B	-	M3	160,320
1.1.12.01.01.0001	Pasir (Untuk Mortar), di quarry	-	M3	178,687
1.1.12.01.01.0001	Tanah Timbunan (di quarry)	-	M3	42,943
1.1.12.01.01.0001	Agregat S	-	M3	154,594
1.1.12.01.01.0001	Pasir Beton (di quarry)	-	M3	186,103
1.1.12.01.01.0001	Agregat Kasar/ Halus	-	M3	246,206
1.1.12.01.01.0001	Agg 20-30Mm (di quarry)	-	M3	246,206
1.1.12.01.01.0001	Agg 0-5 mm (di quarry)	-	M3	200,673
1.1.12.01.01.0001	Agregat Kelas C	-	M3	108,789
1.1.12.01.01.0001	Pasir	-	M3	178,687
1.1.12.01.01.0001	Bronjong Dengan Kawat Dilapisi PVC	-	Buah	524,747
1.1.12.01.01.0001	Kanstin 6 x 15 x 39 cm	-	Bh	21,185
1.1.12.01.01.0001	Kanstin 9 x 20 x 40 cm	-	Bh	21,185
1.1.12.01.01.0001	Cat kayu	-	Kg	74,434
1.1.12.01.01.0001	Cat besi	-	Kg	70,426
1.1.12.01.01.0001	Cat Marka Thermoplastic	-	Kg	25,193
1.1.12.01.01.0001	Glass Bead	-	Kg	22,674
1.1.12.01.01.0001	Cat Anti Karat	-	Kg	51,531
1.1.12.01.01.0001	Meni	-	Kg	48,096
1.1.12.01.01.0001	Seng gelombang BJLS 25 uk. 0.90 x 1.80 m	-	Lbr	532,400
1.1.12.01.01.0001	Seng gelombang BJLS 30 uk. 0.90 x 1.80 m	-	Lbr	447,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur Bj 34 (Titik Leleh 210 Mpa)	-	Kg	23,121
1.1.12.01.01.0001	Kerikil (di quarry)	-	M3	246,206
1.1.12.01.01.0001	Batu pecah mesin 3:5 (di quarry)	-	M3	177,497
1.1.12.01.01.0001	Batu belah pondasi (di lokasi pekerjaan)	-	M3	255,067

KODE	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5
8.1.02.02.11.0008	GOOGLE CLOUD PLATFORM COMMIT CONTRACT(WITH MANAGED SERVICE)	Total 30 vCPU, 56 GB Memory, 450GB SSD, OS Linux, DB Engine MySQL, Include Cloud VPN, Internet Egress, NAT Gateway, Load Balancer, Cloud Armor, Cloud Storage and Operation. Termasuk Managed Service Implementasi Google Cloud, Konsultasi dan Pendampingan, D	Tahun	198,527,207
8.1.02.02.11.0008	Lisensi Network Monitoring Enterprise	Realtime software updates and fixes; Number of monitored devices, ports and sensors; Full autodiscovery of supported devices and metrics; Network mapping through discovery protocols; Rule-based automatic grouping, Threshold, State and Syslog Alerting; Tra	Tahun	20,937,490
8.1.02.02.11.0008	Lisensi Apple Developer (iOS)	Lisensi Apple Developer / App Store / iOS	Tahun	6,000,000
8.1.02.02.11.0008	Software Data Analysis License Proses Data	Software proses dan analisis data yang dapat membantu Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan cara pemerintah dalam memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi dan menggunakan data di dalam dan di luar pemerintahan melalui proses data mining dari berbagai	Paket	2,062,500,000
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan			
8.1.02.03.06	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud			
8.1.02.03.06.0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software			
8.1.02.03.06.0005	Software Data Analysis License Proses Data	Software proses dan analisis data yang dapat membantu Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan cara pemerintah dalam memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi dan menggunakan data di dalam dan di luar pemerintahan melalui proses data mining dari berbagai	Paket	2,062,500,000

WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG



Santosa
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIR 19760604 200604 1 002